

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazami, 2010, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifa'I, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika

Arto Mukti *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Pramedia Grup.

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, Alumni Bandung

Mangkepriyanto Extrix, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Guepedia Publisher

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama

Muhammad Nasir, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Djambatan

Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

Roeslan Saleh, 1987, *Stesel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo.

Sulhin Iqram, 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisa Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Jakarta, Kencana,

Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research I*, Yogyakarta, Gajah Mada.

Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 109-110

van Hamel, P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

Khukuh Wijaya Brian, 2016 “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik dengan Hukum” *Diponegoro Law Journal Vol.V No.4*

Bassang Tommy J, 2015, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming” *Lex Crimen Vol.IV*.

Chahyo Nugroho Okky, 2018, “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.XVIII No.4*

Dewi Indawati Syarifah, 2017 “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)” *Jurnal Verstek Hukum VOL.5*.

Failin, 2017, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendikia Hukum. Vol.III No.1*

Unas Sandro, 2019, “Kajian Yuridsi Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII*.

Oka Wijaya I Komang Gede, 2017 “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga VOL.32 No.1*

Peonasu Cosmin, 2015 “Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment” *Journal of Danubian Studies and Research Vol. 5. No.1/2015.*

Rozi Fachrul, 2018 “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana” *Jurnal Yuridis Unaja, Vol.1, No.2.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

D. Skripsi

Fahrul Muhammad hisbi, 2022, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Wali Nagari (Studi Kasus: Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg.) Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang.

E. Website

<https://databoks.katada.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-90-ribu-korban-perdagangan-manusia-di-seluruh-dunia-pada-2021> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 5 Januari 2024 Pukul 18:09 WIB.

<https://www.kemenpppa.go.id/indek.php.page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan>. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 5 Januari 2024 Pukul 18:30 WIB.

